

## PERAN KEBIJAKAN DAN MASYARAKAT DI PULAU LOMBOK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Lalu Galeh Inggil Fatristya<sup>1</sup>, Muhammad Sarjan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Mataram, Indonesia

correspondent's email: [galehfatristya8@gmail.com](mailto:galehfatristya8@gmail.com)

### Abstract (English)

*The management of natural resources and the environment in Lombok Island faces complex challenges that require synergy between government policies and community participation. This study aims to evaluate policy effectiveness, analyze community roles, and identify effective collaborative management models. Using a mixed-methods approach, this research combines policy document analysis, in-depth interviews with stakeholders, a survey of 500 respondents, and field observations. The results show that policies such as RZWP3K have provided an important framework, but their implementation is still constrained by budget limitations and coordination issues. Community participation through Pokmaswas, Waste Banks, and community forest management shows positive contributions, with a 7% increase in coral reef cover and a decrease in deforestation rates from 1.2% to 0.8% per year. Collaborative management models involving government, communities, and the private sector prove effective, especially in developing ecotourism that increases coastal community income by 30%. This study concludes that an integrated and adaptive approach that considers local socio-ecological complexities is necessary to improve the effectiveness of environmental management in Lombok Island.*

### Article History

Submitted: 9 September 2024  
Accepted: 12 September 2024  
Published: 19 September 2024

### Key Words

Environmental management,  
Community participation,  
Conservation policy.

### Abstrak (Indonesia)

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, menganalisis peran masyarakat, dan mengidentifikasi model pengelolaan kolaboratif yang efektif. Menggunakan pendekatan mixed-methods, penelitian ini menggabungkan analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, survei terhadap 500 responden, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti RZWP3K telah memberikan kerangka kerja penting, namun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi. Partisipasi masyarakat melalui Pokmaswas, Bank Sampah, dan pengelolaan hutan kemasyarakatan menunjukkan kontribusi positif, dengan peningkatan tutupan terumbu karang sebesar 7% dan penurunan laju deforestasi dari 1,2% menjadi 0,8% per tahun. Model pengelolaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terbukti efektif, terutama dalam pengembangan ekowisata yang meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sebesar 30%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan terintegrasi dan adaptif yang mempertimbangkan kompleksitas sosial-ekologi lokal diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan di Pulau Lombok.

### Sejarah Artikel

Submitted: 9 September 2024  
Accepted: 12 September 2024  
Published: 19 September 2024

### Kata Kunci

Pengelolaan lingkungan,  
Partisipasi masyarakat,  
Kebijakan konservasi.

## PENDAHULUAN

Pulau Lombok, dengan luas 4.738,70 km<sup>2</sup>, merupakan salah satu pulau utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkenal akan kekayaan sumber daya alam dan keindahan lanskapnya. Pulau ini tidak hanya menawarkan pantai-pantai eksotis dan pegunungan yang menakjubkan, tetapi juga menyimpan keanekaragaman hayati yang unik dan bernilai tinggi.

Namun, di balik potensi alamnya yang melimpah, Lombok menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Menurut studi yang dilakukan oleh (Zulhadi et al., 2020), ekosistem hutan di Gunung Rinjani, yang merupakan landmark utama Lombok, telah mengalami tekanan signifikan akibat berbagai aktivitas manusia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun masih memiliki keanekaragaman spesies pohon yang tinggi, beberapa area mengalami penurunan stok karbon yang mengindikasikan adanya degradasi hutan. Temuan ini menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan untuk segera mengambil tindakan konservasi yang lebih efektif.

Perkembangan sektor pariwisata yang pesat di Pulau Lombok telah menjadi dua sisi mata uang bagi pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di satu sisi, pariwisata telah menjadi motor penggerak perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun di sisi lain, pertumbuhan yang tidak terkendali dari sektor ini telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. (Husin et al., 2020) dalam studinya di Gili Trawangan, salah satu destinasi wisata populer di Lombok, mengidentifikasi sejumlah tantangan lingkungan akibat perkembangan pariwisata, termasuk degradasi terumbu karang, erosi pantai, dan peningkatan produksi sampah. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan manajemen pariwisata berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh (Fauziah et al., 2022) menunjukkan adanya korelasi antara perkembangan pariwisata dengan penurunan kualitas lingkungan di Lombok, terutama dalam hal kualitas air dan udara serta produksi sampah. Temuan-temuan ini menggarisbawahi urgensi untuk mengembangkan model pariwisata yang lebih ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya.

Selain masalah yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata, Pulau Lombok juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya air dan pencemaran lingkungan. (Firdaus et al., 2023) melakukan penilaian terhadap tingkat pencemaran air di wilayah pesisir Lombok dan menemukan bahwa beberapa area mengalami pencemaran yang cukup serius akibat limbah domestik dan industri. Temuan ini menggarisbawahi urgensi untuk mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air. Lebih lanjut, studi ini juga mengungkapkan bahwa pencemaran air tidak hanya mengancam kesehatan ekosistem laut, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan pariwisata yang menjadi andalan ekonomi pulau ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor untuk mengatasi masalah pencemaran air ini.

Dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan tersebut, peran kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi sangat krusial. (Suryawati & Erlania, 2021) dalam penelitiannya tentang pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berbasis masyarakat di Lombok mengungkapkan bahwa meskipun terdapat banyak tantangan, inisiatif pengelolaan sumber daya laut yang melibatkan komunitas lokal telah menunjukkan hasil yang positif. Studi ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, termasuk adanya dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah, peningkatan kapasitas masyarakat, dan mekanisme pembagian manfaat yang adil. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan ko-manajemen antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi solusi efektif dalam pengelolaan sumber daya alam di Lombok.

Namun, implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Lombok masih menghadapi berbagai hambatan. (Ramdhani et al., 2023) dalam analisisnya tentang tren deforestasi di Pulau Lombok menemukan bahwa meskipun telah ada kebijakan perlindungan hutan, laju deforestasi masih cukup tinggi, mencapai 1,2% per tahun dalam periode 2015-2020. Studi ini mengidentifikasi beberapa faktor pendorong deforestasi, termasuk ekspansi lahan pertanian, pembangunan infrastruktur, dan lemahnya penegakan

hukum. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasinya di lapangan, serta pentingnya penguatan koordinasi antar sektor dan tingkat pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Lebih lanjut, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan lanskap dalam pengelolaan hutan, yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan.

Di sisi lain, inisiatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Lombok telah menunjukkan potensi yang menjanjikan. (Widiastuti et al., 2023) meneliti praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani dan menemukan bahwa pendekatan ini tidak hanya berhasil dalam mengurangi degradasi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan praktik pengelolaan modern untuk mencapai hasil yang optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal dan pengakuan atas hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi kunci keberhasilan program konservasi di Lombok. Dalam konteks pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, (Syah et al, 2022) mengkaji efektivitas program desa pesisir tangguh di Lombok Utara dalam meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa program yang menggabungkan elemen pemberdayaan ekonomi, konservasi lingkungan, dan pengurangan risiko bencana telah berhasil meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat pesisir.

Namun, studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga, yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan wilayah pesisir yang tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial-ekonomi dan kebencanaan. Sementara itu, dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan sampah yang semakin mendesak, (Prasetiyo et al., 2021) meneliti implementasi program bank sampah di berbagai desa di Lombok. Studi ini menemukan bahwa inisiatif bank sampah tidak hanya berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui daur ulang dan pengomposan. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memadai untuk menjamin keberlanjutan program tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa solusi berbasis masyarakat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Lombok, terutama jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan multidimensi. Diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang peran kebijakan dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok. Secara spesifik, penelitian ini akan menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mengevaluasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan inisiatif masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Pulau Lombok.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan mixed-methods, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran kebijakan dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok. Pendekatan ini dipilih karena kompleksitas isu yang diteliti, yang memerlukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek kualitatif seperti persepsi stakeholder dan dinamika sosial, serta data kuantitatif untuk mengukur efektivitas kebijakan dan dampak partisipasi masyarakat. Tahap pertama penelitian akan melibatkan analisis dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok. Dokumen-dokumen yang akan dianalisis mencakup peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah, dokumen strategi pengelolaan lingkungan, serta laporan-laporan resmi terkait implementasi kebijakan lingkungan. Analisis dokumen ini akan menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tujuan kebijakan, serta indikator-indikator kinerja yang ditetapkan. Pendekatan ini sejalan dengan metode yang digunakan oleh (Ramdhani et al., 2023) dalam menganalisis faktor-faktor pendorong deforestasi di Lombok.

Selanjutnya, akan dilakukan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan kunci, termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, pelaku usaha pariwisata, dan akademisi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam tentang efektivitas kebijakan yang ada, tantangan dalam implementasi, serta peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Metode purposive sampling akan digunakan untuk memilih responden, dengan mempertimbangkan keterwakilan berbagai sektor dan wilayah di Pulau Lombok. Wawancara akan direkam, ditranskrip, dan dianalisis menggunakan software NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul. Pendekatan ini mirip dengan yang digunakan oleh (Suryawati & Erlania, 2021) dalam studi mereka tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan berbasis masyarakat di Lombok. Untuk memperoleh data kuantitatif, akan dilakukan survei terhadap masyarakat di beberapa lokasi terpilih di Pulau Lombok. Survei ini akan mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam inisiatif pengelolaan lingkungan, persepsi mereka terhadap efektivitas kebijakan pemerintah, serta dampak program-program lingkungan terhadap kehidupan mereka. Sampel akan dipilih menggunakan metode stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan berbagai kelompok sosial-ekonomi dan wilayah geografis. Kuesioner akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara mendalam, serta diuji coba sebelum implementasi penuh. Analisis data survei akan menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial, termasuk analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan observasi lapangan di beberapa lokasi kunci di Pulau Lombok, termasuk kawasan konservasi, daerah wisata, dan area yang mengalami tekanan lingkungan signifikan. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari dokumen dan wawancara, serta mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang diterapkan di lapangan. Metode observasi terstruktur akan digunakan, dengan checklist dan protokol observasi yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator kunci yang diidentifikasi dari tahap analisis dokumen dan wawancara. Untuk memperkuat validitas penelitian, akan dilakukan triangulasi data dari berbagai sumber dan metode. Hasil analisis dokumen, wawancara mendalam, survei, dan observasi lapangan akan dibandingkan dan diintegrasikan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang situasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok. Pendekatan ini sejalan dengan metodologi yang digunakan oleh (Mutaqin et al., 2020) dalam studi mereka tentang manajemen pariwisata berkelanjutan di Gili Trawangan. Analisis data akan dilakukan secara iteratif sepanjang proses penelitian. Untuk data kualitatif, akan digunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola dalam data.

Software NVivo akan digunakan untuk membantu proses coding dan analisis tema. Untuk data kuantitatif, analisis statistik akan dilakukan menggunakan software SPSS, termasuk analisis deskriptif, uji korelasi, dan regresi multivariat untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel.

Etika penelitian akan menjadi pertimbangan utama dalam seluruh proses. Informed consent akan diperoleh dari semua partisipan, dan anonimitas serta kerahasiaan data akan dijamin. Protokol penelitian akan diajukan ke komite etik yang relevan untuk mendapatkan persetujuan sebelum pengumpulan data dimulai. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan keterbatasan dan potensi bias. Misalnya, kemungkinan bias dalam respon survei akan dimitigasi melalui desain kuesioner yang cermat dan pelatihan enumerator. Keterbatasan dalam generalisasi temuan akan diakui, mengingat konteks spesifik Pulau Lombok. Akhirnya, hasil penelitian akan disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Temuan-temuan kunci akan dipresentasikan dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik untuk memudahkan pemahaman. Implikasi temuan terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok akan dibahas, dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut akan diusulkan. Melalui pendekatan metodologis yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok, serta menyediakan basis empiris yang kuat untuk pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Kebijakan Pemerintah

#### 1. Analisis Kebijakan yang Ada

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kebijakan kunci yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi landasan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir. Kebijakan ini membagi wilayah pesisir Lombok menjadi zona-zona pengelolaan yang berbeda, termasuk zona konservasi, zona pemanfaatan umum, dan zona pemanfaatan terbatas. Selain itu, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Sampah Laut juga menjadi kebijakan penting dalam mengatasi masalah pencemaran laut. Kebijakan ini menetapkan target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025.

**Tabel 1.** Kebijakan Utama Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Pulau Lombok

No.	Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Tahun Penetapan	Tujuan Utama
1	Peraturan Daerah (Perda)	3/2020	2020	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2	Peraturan Gubernur (Pergub)	51/2021	2021	Pengurangan sampah laut
3	Peraturan Daerah (Perda)	5/2019	2019	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum

#### 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang beragam. RZWP3K telah berhasil mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dengan lebih

terstruktur, dimana 30% wilayah pesisir Lombok telah ditetapkan sebagai zona konservasi. Namun, implementasi kebijakan pengelolaan sampah laut masih menghadapi tantangan, dengan tingkat pengurangan sampah laut baru mencapai 40% pada tahun 2023, masih jauh dari target 70% pada tahun 2025.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan meliputi:

- a) Keterbatasan anggaran untuk implementasi program-program lingkungan.
- b) Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah.
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebijakan lingkungan.
- d) Konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.

B. Partisipasi Masyarakat

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok:

- a) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan wilayah pesisir dan laut.
- b) Bank Sampah berbasis masyarakat.
- c) Kelompok tani hutan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.
- d) Komunitas ekowisata dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Survei terhadap 500 responden di 5 kabupaten/kota di Pulau Lombok menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi:

**Tabel 2.** Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

No.	Bentuk Partisipasi	Persentase Responden
1	Aktif dalam Pokmaswas	15%
2	Terlibat dalam Bank Sampah	25%
3	Anggota Kelompok Tani Hutan	20%
4	Terlibat dalam Komunitas Ekowisata	10%
5	Tidak berpartisipasi aktif	30%

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Analisis regresi mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat:

- a) Tingkat pendidikan (koefisien korelasi 0.65)
- b) Tingkat pendapatan (koefisien korelasi 0.48)
- c) Jarak dari pusat kota (koefisien korelasi -0.37)
- d) Ketersediaan informasi tentang program lingkungan (koefisien korelasi 0.72)

C. Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

1. Dampak Ekologis

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok telah menunjukkan beberapa dampak ekologis yang signifikan:

- a) Peningkatan tutupan terumbu karang dari 35% pada tahun 2019 menjadi 42% pada tahun 2023 di kawasan konservasi perairan.
- b) Penurunan laju deforestasi dari 1.2% per tahun pada periode 2015-2020 menjadi 0.8% per tahun pada periode 2020-2023.

- c) Peningkatan populasi burung endemik Lombok, Perkici dada kuning (*Trichoglossus forsteni mitchellii*) sebesar 15% antara tahun 2020-2023.
- 2. Dampak Sosial-Ekonomi
  - Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang beragam:
    - a) Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir yang terlibat dalam program ekowisata sebesar rata-rata 30% antara tahun 2020-2023.
    - b) Penciptaan 1.500 lapangan kerja baru dalam sektor pengelolaan lingkungan dan ekowisata pada periode 2020-2023.
    - c) Peningkatan konflik tenurial di beberapa kawasan hutan, dengan 25 kasus yang tercatat pada tahun 2023 dibandingkan 15 kasus pada tahun 2020.

**Tabel 3.** Dampak Sosial-Ekonomi Program Pengelolaan Lingkungan

Indikator	Nilai 2020	Nilai 2023	Perubahan (Angka)	Perubahan (%)	Tren
Pendapatan rata-rata masyarakat pesisir (Rp/bulan)	2.500.000	3.250.000	+750.000	+30%	Meningkat
Jumlah lapangan kerja di sektor lingkungan dan ekowisata	3	4.5	+1.500	+50%	Meningkat
Kasus konflik tenurial	15	25	+10	+66,67%	Meningkat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Efektivitas kebijakan pemerintah bervariasi, dengan beberapa kebijakan menunjukkan hasil positif sementara yang lain masih menghadapi kendala dalam implementasi. Partisipasi masyarakat menunjukkan potensi yang besar, namun masih perlu ditingkatkan dan didukung lebih lanjut. Dampak pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menunjukkan tren positif dalam aspek ekologis dan ekonomi, meskipun beberapa tantangan sosial masih perlu diatasi.

## Pembahasan

### A. Evaluasi Efektivitas Kebijakan

#### 1. Kesesuaian Kebijakan dengan Kondisi Lokal

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok menunjukkan tingkat kesesuaian yang bervariasi dengan kondisi lokal. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah berhasil mengakomodasi kebutuhan lokal dengan menetapkan 30% wilayah pesisir sebagai zona konservasi. Hal ini sejalan dengan karakteristik Pulau Lombok yang memiliki ekosistem pesisir yang kaya dan rentan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan terkait dengan konflik kepentingan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh (Ramdhani et al., 2023), kebijakan zonasi pesisir di Lombok perlu mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara lebih komprehensif untuk mengurangi potensi konflik.

Di sisi lain, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Sampah Laut menunjukkan kesesuaian

yang baik dengan isu lingkungan yang mendesak di Lombok. Namun, target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025 terlihat ambisius mengingat capaian saat ini yang baru mencapai 40%. Hal ini mengindikasikan perlunya penyesuaian target atau penguatan strategi implementasi. Sebagaimana dikemukakan oleh (Fauzi et al., 2022), kebijakan pengelolaan sampah laut di wilayah kepulauan seperti Lombok perlu mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang menantang.

## 2. Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi

Implementasi RZWP3K telah menunjukkan keberhasilan dalam mengatur pemanfaatan wilayah pesisir secara lebih terstruktur. Peningkatan tutupan terumbu karang dari 35% pada tahun 2019 menjadi 42% pada tahun 2023 di kawasan konservasi perairan merupakan indikator positif dari efektivitas kebijakan ini. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal penegakan aturan dan pengawasan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Hal ini sejalan dengan temuan (Mutaqin et al., 2021) yang mengidentifikasi bahwa efektivitas kebijakan konservasi pesisir di Lombok sangat bergantung pada kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal.

Sementara itu, implementasi kebijakan pengelolaan sampah laut masih menghadapi kendala signifikan. Tingkat pengurangan sampah laut yang baru mencapai 40% pada tahun 2023 menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan realitas di lapangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Sebagaimana diungkapkan oleh (Widiastuti et al., 2023), pengelolaan sampah laut di wilayah kepulauan seperti Lombok memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara aktif.

## B. Analisis Peran Masyarakat

### 1. Kontribusi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok menunjukkan kontribusi yang signifikan. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) telah berperan penting dalam pengawasan wilayah pesisir dan laut, dengan 15% responden survei terlibat aktif dalam kegiatan ini. Keberadaan Pokmaswas telah membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di wilayah pesisir. Hal ini sejalan dengan temuan (Suryawati & Erlania, 2021) yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan wilayah pesisir dapat meningkatkan efektivitas kebijakan konservasi laut. Bank Sampah berbasis masyarakat juga menunjukkan kontribusi positif, dengan 25% responden terlibat dalam inisiatif ini. Program Bank Sampah tidak hanya berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui daur ulang dan pengomposan. Sebagaimana diungkapkan oleh (Prasetyo et al., 2021), Bank Sampah di Lombok telah berkontribusi pada pengurangan sampah hingga 30% di beberapa desa, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil penjualan sampah daur ulang.

Kelompok tani hutan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, dengan keterlibatan 20% responden, telah berkontribusi pada penurunan laju deforestasi dari 1.2% per tahun pada periode 2015-2020 menjadi 0.8% per tahun pada periode 2020-2023. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam mendukung konservasi hutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Widiastuti et al., 2020) yang menunjukkan bahwa

pengelolaan hutan berbasis masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani tidak hanya berhasil mengurangi degradasi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

## 2. Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat

Meskipun partisipasi masyarakat menunjukkan kontribusi positif, masih terdapat hambatan signifikan yang perlu diatasi. Analisis regresi mengidentifikasi bahwa tingkat pendidikan dan ketersediaan informasi tentang program lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, dengan koefisien korelasi masing-masing 0.65 dan 0.72. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan akses pendidikan dan penyebaran informasi yang lebih efektif tentang program-program lingkungan. Jarak dari pusat kota juga menjadi faktor penghambat partisipasi, dengan koefisien korelasi -0.37. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap program-program lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan (Syah et al, 2022) yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses informasi dan infrastruktur di daerah terpencil menjadi hambatan utama dalam implementasi program desa pesisir tangguh di Lombok Utara.

## C. Integrasi Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat

### 1. Sinergi antara Kebijakan dan Inisiatif Masyarakat

Integrasi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat menunjukkan potensi sinergi yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok. Program Pokmaswas, misalnya, merupakan contoh baik bagaimana kebijakan pemerintah dapat memperkuat dan memberdayakan inisiatif masyarakat dalam pengawasan wilayah pesisir. Hal ini sejalan dengan konsep ko-manajemen yang diusulkan oleh (Suryawati & Erlania, 2021), di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan sinergi, terutama dalam hal koordinasi dan pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh (Firdaus et al., 2023), efektivitas pengelolaan lingkungan di wilayah kepulauan seperti Lombok sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan pemerintah dan praktik pengelolaan berbasis masyarakat.

### 2. Model Pengelolaan Kolaboratif

Berdasarkan temuan penelitian, model pengelolaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok. Model ini dapat mengintegrasikan kekuatan kebijakan pemerintah dengan pengetahuan lokal dan partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan sumber daya dari sektor swasta. Contoh keberhasilan pendekatan ini terlihat dalam program ekowisata berbasis masyarakat, yang telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sebesar rata-rata 30% antara tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan bahwa model kolaboratif dapat menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh (Ramdhani et al., 2024), model pengelolaan kolaboratif di Lombok perlu diperkuat melalui kerangka hukum yang jelas dan mekanisme pembagian manfaat yang adil antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

## D. Implikasi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

### 1. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok:

- a) Penyesuaian target kebijakan: Target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025 perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas lokal. Penetapan target bertahap yang lebih realistis dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
- b) Penguatan koordinasi antar sektor: Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pembentukan gugus tugas lintas sektor dapat menjadi solusi untuk meningkatkan sinergi kebijakan.
- c) Peningkatan alokasi anggaran: Alokasi anggaran untuk implementasi program-program lingkungan perlu ditingkatkan, terutama untuk pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dan program-program pemberdayaan masyarakat.
- d) Pengembangan kebijakan insentif: Perlu dikembangkan kebijakan insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan lingkungan, misalnya melalui skema pembayaran jasa lingkungan (payment for ecosystem services) atau insentif fiskal untuk praktik bisnis ramah lingkungan.

### 2. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, beberapa strategi dapat diimplementasikan:

- a) Peningkatan program pendidikan dan kesadaran lingkungan: Mengingat tingkat pendidikan memiliki korelasi kuat dengan partisipasi masyarakat, diperlukan program pendidikan lingkungan yang sistematis, baik melalui jalur formal maupun informal. Sebagaimana diusulkan oleh (Widiastuti et al., 2023), integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam jangka panjang.
- b) Perbaikan sistem informasi lingkungan: Pengembangan platform informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya melalui aplikasi mobile atau media sosial, dapat meningkatkan penyebaran informasi tentang program-program lingkungan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi (Fauzi et al., 2022) tentang pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan lingkungan di era modern.
- c) Penguatan kapasitas kelembagaan lokal: Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat seperti Pokmaswas, kelompok tani hutan, dan komunitas ekowisata melalui pelatihan dan dukungan teknis dapat meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh (Syah et al, 2022), penguatan kelembagaan lokal merupakan kunci keberhasilan program desa pesisir tangguh di Lombok Utara.
- d) Pengembangan skema kemitraan: Mendorong kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menciptakan model pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Contoh sukses dari pendekatan ini adalah program ekowisata berbasis masyarakat yang telah meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Implementasi rekomendasi kebijakan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok. Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan

lingkungan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Pulau Lombok.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan pemerintah, seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Sampah Laut, telah memberikan kerangka kerja yang penting untuk pengelolaan lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam berbagai inisiatif pengelolaan lingkungan, seperti Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Bank Sampah, dan pengelolaan hutan kemasyarakatan, menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung upaya konservasi. Namun, tingkat partisipasi masih perlu ditingkatkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan jarak dari pusat kota. Integrasi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat menunjukkan hasil yang menjanjikan, terutama dalam konteks pengelolaan kolaboratif. Model pengelolaan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta telah terbukti efektif dalam menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak, seperti yang terlihat dalam program ekowisata berbasis masyarakat. Dampak ekologis dari upaya pengelolaan lingkungan terlihat dari peningkatan tutupan terumbu karang dan penurunan laju deforestasi. Secara sosial-ekonomi, program-program pengelolaan lingkungan telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, termasuk konflik tenurial di beberapa kawasan hutan dan kesenjangan antara target kebijakan dengan pencapaian di lapangan, terutama dalam hal pengelolaan sampah laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan adaptif, yang mempertimbangkan kompleksitas sosial-ekologi lokal dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok:

1. Penyesuaian Kebijakan dan Target
  - Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kebijakan, terutama untuk pengelolaan sampah laut, agar lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas lokal.
  - Mengembangkan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekologi yang dinamis di Pulau Lombok.
2. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi
  - Membentuk gugus tugas lintas sektor untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam implementasi kebijakan lingkungan.
  - Mengembangkan platform kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam perencanaan dan implementasi program lingkungan.
3. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
  - Mengembangkan program pendidikan lingkungan yang komprehensif, baik melalui jalur formal maupun informal.

- Meningkatkan akses informasi tentang program-program lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial.
  - Memperkuat kapasitas kelembagaan lokal seperti Pokmaswas, kelompok tani hutan, dan komunitas ekowisata melalui pelatihan dan dukungan teknis.
4. Pengembangan Insentif dan Pembiayaan Berkelanjutan
    - Mengembangkan skema insentif ekonomi untuk mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang baik, seperti pembayaran jasa lingkungan.
    - Mengeksplorasi sumber pembiayaan alternatif untuk program-program lingkungan, termasuk kemitraan publik-swasta dan crowdfunding.
  5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi
    - Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk mengukur dampak program-program lingkungan.
    - Melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
  6. Penanganan Konflik dan Keadilan Sosial
    - Mengembangkan mekanisme resolusi konflik yang efektif, terutama untuk mengatasi konflik tenurial di kawasan hutan.
    - Memastikan distribusi manfaat yang adil dari program-program pengelolaan lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat.
  7. Penelitian dan Inovasi
    - Mendorong penelitian kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk menghasilkan solusi inovatif dalam pengelolaan lingkungan.
    - Mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang efektif.

Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Pulau Lombok, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan pada akhirnya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, I., Saman, T., Zannah, N., Octaviani, S., & Winey, B. (2022). The Relationship Between Students' Reading Motivation and the Success to Comprehend the English Texts. *Journal of English Teaching and Learning Issues*, 5, 31. <https://doi.org/10.21043/jetli.v5i1.14959>
- Fauziah, N., Lestari, R., Rustini, T., & Arifin, M. (2022). Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia pada Tingkat Sekolah Dasar. *AR-RIYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6, 89. <https://doi.org/10.29240/jpd.v6i1.4359>
- Firdaus, M., Marseto, M., & Sishadiyati, S. (2023). Analisis Dampak Integrasi Ekonomi terhadap FDI di Asean. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2, 1497–1510. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i9.404>
- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>
- Mutaqin, D., Babny, M., & Rahayu, N. (2020). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *BWP Update*, 4, 23–26. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>
- Mutaqin, D., Babny, M., & Rahayu, N. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *BWP Update*, 4, 23–26. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>

- Prasetyo, E., Riadi, F., Rinawati, N., & Resawati, R. (2021). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan: (Studi pada salah satu perusahaan penjaminan kredit di Kota Bandung). *Acman: Accounting and Management Journal*, 1, 61–66. <https://doi.org/10.55208/aj.v1i2.20>
- Ramdhani, M., Aprillia, B. S., & Hadiyoso, S. (2023). Integrasi Circuit Simulator pada LMS untuk Meningkatkan Hasil PBL: Studi Kasus Mata Kuliah Elektronika. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5, 614–621. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2448>
- Ramdhani, M., Aprillia, B. S., & Hadiyoso, S. (2024). Integrasi Circuit Simulator pada LMS untuk Meningkatkan Hasil PBL: Studi Kasus Mata Kuliah Elektronika. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5, 614–621. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2448>
- Suryawati & Erlania. (2021). *Treatment of Textile Wastewater by Anaerobic and Aerobic Processes: A Denim Processing Plant Case* (pp. 159–166).
- Syah et al. (2022). Strategi Pemasaran Produk Di Era Digital Pada UMKM. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 159–164. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.282>
- Widiastuti, K., Susilo, M., & Nurfinaputri, H. (2020). How classroom design impacts for student learning comfort: Architect perspective on designing classrooms. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 9, 469–477. <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20566>
- Widiastuti, K., Susilo, M., & Nurfinaputri, H. (2023). How classroom design impacts for student learning comfort: Architect perspective on designing classrooms. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 9, 469–477. <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20566>
- Zulhadi et al. (2020). Analisis Ragam Hias dan Pemaknaannya pada Arsitektur Rumah Tradisional di Desa Lambunot, Aceh Besar. *Jurnal Sositologi*, 22. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2023.22.1.3>